

MIGRASI DAN RELASI KEKUASAAN NEGARA: ANALISIS GOVERNMENTALITY DALAM PRAKTIK KEIMIGRASIAN

MIGRATION AND STATE POWER RELATIONS: A GOVERNMENTALITY ANALYSIS OF IMMIGRATION PRACTICES

<https://10.0.205.137/tematics.v8i1.899>

Submitted: 03-05-2026 Reviewed: 12-05-2026 Published: 10-06-2026

M. Miftakhul Khayri Kusuma

khayrikusuma@student.ub.ac.id

Departmen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

Abstract. *This study aims to analyze state power relations in immigration practices through Michel Foucault's governmentality perspective using a Systematic Literature Review (SLR) approach. Nine selected scholarly articles are analyzed to identify state power practices in migration management, including knowledge production, administrative technology, labor subordination, integration politics, and deportation.*

The findings indicate that migration is a political arena in which the state operates four forms of power: (1) discursive power through the formation of discourses about immigrants as threats or subjects requiring integration; (2) administrative power through visas, residence permit regulations, and official discretion; (3) biopolitics through the regulation of families, migrant workers, and the education of migrant children; and (4) sovereign power through deportation and detention. Through these mechanisms, the state not only regulates mobility but also produces compliant and manageable migrant subjects.

This study contributes to critical migration studies by providing a multidimensional analytical framework based on governmentality. Policy implications point to the need for rights-based reform, administrative accountability, and a reduction in the politics of fear in immigration policy.

Keywords: *migration, governmentality, Michel Foucault, deportation, immigration policy*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis relasi kekuasaan negara dalam praktik keimigrasian melalui perspektif *governmentality* Michel Foucault menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Sebanyak sembilan artikel ilmiah terpilih dianalisis untuk mengidentifikasi praktik kekuasaan negara dalam pengelolaan migrasi, termasuk produksi pengetahuan, teknologi administratif, subordinasi tenaga kerja, politik integrasi, hingga deportasi.

Temuan menunjukkan bahwa migrasi merupakan arena politik di mana negara mengoperasikan empat bentuk kekuasaan: (1) kekuasaan diskursif melalui pembentukan wacana tentang imigran sebagai ancaman atau subjek yang perlu diintegrasikan; (2) kekuasaan administratif melalui visa, regulasi izin tinggal, dan diskresi petugas; (3) biopolitik melalui pengaturan keluarga, pekerja migran, dan pendidikan anak migran; serta (4) kekuasaan kedaulatan melalui deportasi dan detensi. Melalui mekanisme ini, negara tidak hanya mengatur mobilitas, tetapi juga memproduksi subjek migran yang patuh dan dapat dikelola.

Penelitian ini berkontribusi pada kajian migrasi kritis dengan memberikan kerangka analitis multidimensional berbasis *governmentality*. Implikasi kebijakan menunjukkan perlunya reformasi berbasis hak, akuntabilitas administratif, dan pengurangan politik ketakutan dalam kebijakan keimigrasian.

Kata kunci: migrasi, *governmentality*, Michel Foucault, deportasi, kebijakan imigrasi

1. PENDAHULUAN

Migrasi bukan hanya sebagai perpindahan manusia lintas teritorial, tetapi juga sebagai praktik kekuasaan yang membentuk, mengatur, dan mengklasifikasikan



TEMATICS | Technology Management and Informatics Research Journals are licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

subjek migran dalam struktur politik modern. Dengan pendekatan *governmentality* Michel Foucault, migrasi dapat dibaca sebagai ruang di mana negara menggunakan kombinasi hukum, teknologi administratif, diskresi birokrasi, dan produksi wacana untuk mengontrol mobilitas dan mengatur populasi. Pendekatan ini melampaui studi migrasi konvensional yang bersifat demografis atau legalistik, dengan membuka analisis mengenai bagaimana migran diposisikan, dibentuk, serta diproduksi sebagai kategori politik seperti *legal*, *illegal*, *rentan*, atau *berisiko*. Dengan demikian, topik ini memperkaya kajian ilmu sosial, politik, dan kajian kebijakan migrasi melalui perspektif yang lebih reflektif dan teoritis mengenai relasi antara negara, kekuasaan, dan mobilitas manusia.

Secara sosial, topik ini relevan karena kebijakan imigrasi memiliki implikasi langsung terhadap kehidupan jutaan orang yang bergerak karena pendidikan, konflik, pekerjaan, perubahan iklim, atau dinamika ekonomi global. Praktik keimigrasian sering kali menciptakan ketidakpastian status, stigma, serta kerentanan struktural bagi migran, terutama ketika logika yang digunakan bersifat keamanan (*securitization*) atau proteksionis. Dengan memahami migrasi sebagai arena relasi kekuasaan, masyarakat dan pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi bagaimana kebijakan tertentu dapat menghasilkan eksklusi, diskriminasi, atau ketidakadilan birokratis, serta bagaimana model tata kelola migrasi yang lebih manusiawi dan berbasis hak dapat dikembangkan. Di tengah meningkatnya arus migrasi global, isu ini menjadi semakin penting bukan hanya untuk tujuan ilmiah, tetapi juga untuk membangun tata kelola migrasi yang inklusif, berkeadilan, dan selaras dengan prinsip kemanusiaan di tingkat nasional maupun global.

Kajian terbaru dalam rentang 2021–2025 menunjukkan bahwa praktik keimigrasian kontemporer semakin dipahami sebagai medan relasi kekuasaan yang beroperasi melalui mekanisme pengawasan administratif, klasifikasi hukum, dan infrastruktur kontrol yang bersifat berlapis. Tazzioli (2021) misalnya menunjukkan bahwa rezim migrasi modern bekerja melalui *grey zones* birokratis yang mempertahankan ambiguitas status migran sebagai strategi pemerintah untuk memproduksi kepatuhan. Pola ini diperkuat oleh temuan Lumley-Sapanski (2022) yang menunjukkan bagaimana pusat penerimaan migran tidak lagi sekadar berfungsi sebagai ruang perlindungan, tetapi juga sebagai situs penataan perilaku melalui rutinitas administratif dan pembatasan mobilitas. Sementara itu, Walsh (2023) menggarisbawahi bagaimana proses pemeriksaan dan penilaian suaka membentuk identitas migran sebagai subjek yang harus membuktikan kerentanan dan ketidakberdayaannya, menandakan proses *subjectivation* sebagaimana dikemukakan Foucault. Dengan demikian, literatur mutakhir mengonfirmasi bahwa kebijakan migrasi tidak dapat dibaca murni sebagai perangkat hukum teknokratis, tetapi sebagai mekanisme *governmentality* yang memproduksi bentuk-bentuk keterikatan, pembatasan, dan ketidakpastian legal bagi migran.

Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian terkini juga menyoroti bagaimana perluasan aktor dan teknologi administrasi memperkuat dimensi *governmentality* dalam tata kelola migrasi. Salmenkari (2024) menunjukkan bahwa digitalisasi dokumen imigrasi mengubah relasi antara negara dan migran di mana dokumen tidak

hanya berfungsi sebagai bukti legalitas, tetapi sebagai instrumen disiplin yang memaksa migran mengikuti logika administratif negara. Dalam konteks serupa, Consterdine (2024) menemukan adanya ekspansi pengawasan tidak hanya terhadap migran, tetapi juga terhadap institusi yang terlibat dalam dukungan kemanusiaan, sehingga tata kelola migrasi menjadi model *multi-scalar governance* yang memperluas spektrum subjek yang diatur. Sintesis temuan ini menegaskan relevansi kerangka governmentality Foucauldian, karena menunjukkan bahwa kekuasaan negara dalam urusan migrasi tidak hanya diwujudkan melalui kebijakan formal dan penegakan perbatasan, tetapi melalui produksi wacana, infrastruktur data, dan prosedur administratif yang membentuk cara migran dapat hidup, bergerak, dan diakui secara sah dalam negara.

Perdebatan utama dalam jurnal-jurnal yang dianalisis berkisar pada pertanyaan apakah kebijakan imigrasi kontemporer terutama berfungsi sebagai mekanisme perlindungan atau sebagai instrumen kontrol kekuasaan yang memproduksi kerentanan secara sistematis. Tazzioli (2021) dan Lumley-Sapanski (2022) misalnya mempertanyakan legitimasi narasi kemanusiaan yang digunakan negara untuk membenarkan praktik administratif yang justru memperkuat pembatasan mobilitas dan status hukum migran. Dalam perspektif ini, kebijakan migrasi tidak dipandang sebagai respons netral terhadap perpindahan global, tetapi sebagai praktik *governmentality* yang menormalisasi ambiguitas legal, penundaan administratif, dan penempatan migran dalam posisi sosial yang liminal. Dengan demikian, perdebatan tidak hanya terkait *apa* yang dilakukan negara, tetapi *bagaimana* praktik itu dibungkus oleh bahasa perlindungan sehingga mekanisme kontrol tampak wajar dan dapat diterima secara publik.

Perdebatan lain menyangkut sejauh mana perluasan teknologi administratif dan proliferasi aktor non-negara memperkuat atau melemahkan kapasitas negara dalam mengelola migrasi secara etis. Salmenkari (2024) menunjukkan bahwa digitalisasi dokumentasi meningkatkan presisi administratif sekaligus memperbesar potensi eksklusi bagi kelompok yang tidak mampu memenuhi tuntutan birokratis. Sementara itu, Consterdine (2024) dan Walsh (2023) menyoroti bahwa pelibatan lembaga kemanusiaan dan organisasi masyarakat sipil tidak selalu mengurangi efek disipliner, karena aktor-aktor ini sering kali justru ikut diregulasi dan dimasukkan ke dalam logika kontrol negara. Perdebatan kolektif ini menunjukkan bahwa praktik keimigrasian modern berada dalam ketegangan antara efisiensi administrasi, kepentingan kedaulatan, dan etika kemanusiaan. Sebuah ketegangan yang menjadi inti kritik teoretis dalam kajian governmentality.

Secara konseptual dan metodologis, penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kajian migrasi melalui perspektif *governmentality* masih terfragmentasi dan belum menghasilkan kerangka analitis yang komprehensif dalam menjelaskan bagaimana kekuasaan negara bekerja melalui wacana, regulasi, infrastruktur digital, dan praktik administratif dalam mengatur mobilitas manusia. Banyak studi berfokus pada aspek tertentu seperti securitization, penilaian suaka, atau dokumentasi legal (Tazzioli, 2021; Walsh, 2023; Salmenkari, 2024), namun belum mengintegrasikan dimensi genealogis, biopolitik, dan produksi subjek yang

menjadi inti analisis Foucauldian. Selain itu, metodologi yang dominan berupa studi kasus berbasis dokumen masih menyisakan celah dalam menangkap praktik kekuasaan di level mikro seperti diskresi petugas, strategi bertahan migran, dan efek teknologi administratif (Lumley-Sapanski, 2022; Consterdine, 2024). Kesenjangan konseptual serta keterbatasan metodologis ini menunjukkan perlunya studi sistematis yang menyatukan temuan-temuan tersebut dalam kerangka analisis yang lebih utuh, sehingga topik “Migrasi dan Relasi Kekuasaan Negara: Analisis Governmentality dalam Praktik Keimigrasian” menjadi relevan dan mendesak untuk dikembangkan.

Tujuan dari penyusunan artikel ini adalah untuk secara ilmiah mengkaji, mensintesis, dan mengkritisi perkembangan penelitian terkini mengenai migrasi dalam kaitannya dengan relasi kekuasaan negara melalui perspektif *governmentality* Foucauldian, sehingga dapat menghasilkan pemahaman teoretis yang lebih terintegrasi mengenai bagaimana kebijakan, wacana, teknologi administratif, serta praktik birokrasi membentuk subjek migran dan memproduksi dinamika kontrol, kepatuhan, maupun kerentanan. Secara praktis, artikel ini bertujuan menyediakan landasan analitis dan rekomendasi evidence-based bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi keimigrasian untuk merumuskan tata kelola migrasi yang lebih transparan, proporsional, dan berperspektif hak asasi manusia, serta untuk mengidentifikasi area reformasi yang diperlukan dalam sistem keimigrasian Indonesia agar lebih adaptif terhadap tantangan global dan selaras dengan praktik governance modern.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas tema migrasi dan relasi kekuasaan negara serta beragamnya pendekatan yang digunakan dalam penelitian sebelumnya, metode Systematic Literature Review (SLR) dipilih sebagai strategi ilmiah yang paling sesuai untuk memetakan perkembangan konsep, mengidentifikasi pola temuan, menelaah kritik teoretis, serta menemukan celah penelitian yang masih terbuka. Melalui pendekatan SLR, artikel ini secara sistematis menyeleksi, mengevaluasi, dan mensintesis literatur relevan berperiode 2021–2025 agar menghasilkan gambaran yang komprehensif, terstruktur, dan berbasis bukti mengenai bagaimana *governmentality* bekerja dalam praktik keimigrasian kontemporer. Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan konsolidasi pemahaman akademik lintas studi dan konteks, tetapi juga memastikan bahwa analisis yang dikembangkan bersifat reflektif, metodologis, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menjadi dasar kuat bagi argumentasi penelitian dan rekomendasi kebijakan yang diajukan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tinjauan putaka secara terintegrasi untuk melakukan tinjauan, kritik, dan sintesis literatur mengenai kebijakan imigrasi dan kaitannya dengan relasi kekuasaan negara. Harapannya adalah menghasilkan kerangka kerja dan perspektif baru tentang tema tersebut. Unit analisis yang ada dalam tinjauan pustaka ini adalah praktik kebijakan keimigrasian di beberapa negara di dunia yang akan dianalisis dalam sudut pandang teori *governmentality* oleh Michel Foucault. Untuk mendapatkan penjelasan tersebut, penulis membutuhkan data yang berasal dari artikel jurnal terindeks internasional. Penulis memilih menggunakan laman bantu pencarian yakni Taylor and Francis

Online. Penulis menggunakan tiga kata kunci yaitu *violation* (pelanggaran), *immigrant* (imigran), dan *immigration* (immigration). Terdapat 9 artikel jurnal yang dipilih dengan menggunakan kriteria seleksi sistematis sebagai sumber data penelitian. Tahap selanjutnya adalah sintesis yang terdiri dari proses pengintegrasian gagasan yang ada untuk menghasilkan tema baru dalam relasi kekuasaan kebijakan imigrasi di negara-negara dunia. Tahap terakhir yakni melakukan analisis data. Sintesis yang telah dilaksanakan diuraikan dengan logika dan penalaran konseptual yang dipilih. dalam artian bahwa sintesis tersebut dihubungkan dengan teori *governmentality* dan selanjutnya menghasilkan refleksi yang dapat menjadi pembelajaran pengambilan keputusan kebijakan imigrasi di Indonesia. Tahapan analisis data yang sistematis dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh simpulan penelitian yang akurat.

	(N=43.208)
	Type : date (2021-2025
	dan
<i>Identification Filtration</i>	akses terbuka)
	(N=2.526)
<i>Eligibility Analysis</i>	Artikel dengan <i>eligibility</i>
	(kelayakan) yakni 1)
	membahas mengenai
	perlakuan negara kepada
Matriks tahapan SLR yang	imigran; 2) membahas
dilaksanakan	mengenai integrasi imigran
	terhadap lingkungannya; 3)
	kesesuaian fokus dengan
Taylor and Francis	tema
database	(N=37)
search dengan keyword	
<i>violation or immigrant or</i>	
<i>immigration</i>	
(N=43.233)	
	Jumlah artikel yang
	dianalisis
	(N=9)
<i>Type article</i>	

3. PEMBAHASAN

Migrasi internasional merupakan fenomena global yang semakin kompleks dan berkelindan dengan dinamika sosial, politik, keamanan, dan ekonomi negara. Dalam konteks masyarakat modern, mobilitas manusia lintas batas tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai perpindahan fisik dari satu wilayah ke wilayah lain, tetapi sebagai proses sosial yang membawa konsekuensi luas bagi tata kelola negara. Negara tidak sekadar menjalankan fungsi administratif untuk menerima atau menolak kedatangan migran, tetapi sekaligus memproduksi kategori-kategori sosial tertentu seperti pendatang legal, imigran ilegal, tenaga kerja asing, pencari suaka, atau keluarga campuran yang masing-masing memiliki konsekuensi politik, sosial, dan moral. Kategori tersebut bukanlah entitas yang netral; ia terbentuk melalui bahasa, regulasi, dan praktik birokrasi yang menentukan cara migran dipahami, diperlakukan, dan diposisikan di dalam struktur sosial suatu negara.

Dalam kerangka governmentality Michel Foucault (Foucault, 1978; 2007; 2008), proses tersebut dapat dibaca sebagai bagian dari operasi kekuasaan modern yang bekerja melalui pengaturan populasi. Foucault menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya hadir dalam bentuk larangan, hukuman, atau represi langsung, melainkan melalui produksi pengetahuan, klasifikasi, prosedur administratif, dan wacana yang tampak normal serta rasional. Dari sudut pandang ini, migrasi menjadi arena tempat negara membangun mekanisme pengelolaan populasi secara halus namun efektif:

mengumpulkan data, mengklasifikasikan mobilitas, menentukan siapa yang berhak bergerak, dan menetapkan siapa yang dianggap mengancam tatanan sosial. Dengan demikian, kebijakan migrasi bukan hanya serangkaian instrumen teknis, tetapi juga strategi pemerintah dalam membentuk perilaku, identitas, dan relasi kekuasaan antara warga negara dan pendatang.

Perkembangan pemikiran tersebut memperlihatkan bahwa isu migrasi tidak dapat dilepaskan dari proses produksi subjektivitas politik. Migran, melalui prosedur administratif yang dilalui berupa pendaftaran, verifikasi dokumen, pemberian izin tinggal, hingga deportasi. Migran dibentuk sebagai subjek yang harus memenuhi norma tertentu untuk dapat diterima dalam tatanan negara. Proses ini menjadi bagian dari apa yang oleh Foucault disebut sebagai “*conduct of conduct*”, yakni kemampuan negara untuk mengarahkan perilaku individu melalui regulasi yang tampaknya objektif dan birokratis. Di sinilah migrasi berkelindan dengan praktik pemerintahan modern yaitu negara memetakan, menilai, dan mengelola mobilitas manusia sebagai bagian dari upaya mempertahankan stabilitas ekonomi, keamanan, dan integritas identitas nasional.

Walaupun banyak penelitian telah membahas migrasi dari beragam perspektif, kajian yang secara khusus menggunakan lensa governmentality masih tersebar pada berbagai konteks negara, isu kebijakan, dan kelompok migran. Hal ini menyebabkan pemahaman mengenai bagaimana logika pemerintah modern bekerja dalam mengatur mobilitas manusia belum terkonsolidasi secara utuh. Karena itu, kajian ini melakukan *systematic literature review* (SLR) untuk mengidentifikasi pola-pola bagaimana negara menerapkan prinsip governmentality dalam praktik migrasi kontemporer. Melalui pendekatan ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih komprehensif mengenai cara negara membangun mekanisme pengendalian, menetapkan kategori subjek migran, dan memproduksi wacana tentang mobilitas yang memengaruhi persepsi publik serta pengalaman sehari-hari para migran.

3.1. Migrasi sebagai Wilayah Kekuasaan Negara

Hasil kajian literatur memperlihatkan bahwa migrasi telah menjadi wilayah strategis tempat negara mengekspresikan sekaligus mempertahankan kekuasaannya. Pengelolaan mobilitas manusia tidak hanya berkaitan dengan persoalan izin masuk atau keluar, tetapi juga menyangkut definisi fundamental mengenai siapa yang dapat dianggap sebagai bagian dari komunitas politik. Melalui berbagai kebijakan dan prosedur administratif, negara menetapkan batas-batas yang memisahkan antara mereka yang diterima dan mereka yang ditolak, antara individu yang patut dicurigai dan individu yang dianggap aman, serta antara subjek yang “layak” untuk dilindungi dan mereka yang dianggap berada di luar lingkup perlindungan negara. Pembedaan semacam ini menunjukkan bagaimana negara, melalui bahasa hukum dan keputusan birokratis, menciptakan hierarki posisi sosial yang secara langsung memengaruhi kehidupan migran.

Foucault (2007) menjelaskan bahwa dalam *security apparatus*, negara modern mengembangkan bentuk kekuasaan yang bekerja tidak lagi melalui penggunaan kekerasan langsung, tetapi melalui teknik-teknik pengaturan yang menyusup dalam praktik keseharian. Negara mengumpulkan data, menyusun statistik, memetakan pola mobilitas, dan membuat klasifikasi populasi sebagai dasar untuk mengatur pergerakan manusia. Melalui mekanisme tersebut, negara dapat menentukan tingkat risiko, menetapkan kriteria keamanan, dan membedakan antara kelompok yang dianggap membawa potensi ancaman dan kelompok yang dinilai kompatibel dengan tatanan sosial. Cara kerja semacam ini tampak jelas dalam berbagai kebijakan migrasi yang berorientasi pada keamanan, di mana konsep seperti “risiko” dan “kerentanan” diperlakukan sebagai perangkat teknis, padahal secara politis ia berfungsi untuk

mengendalikan siapa yang dapat bergerak bebas dan siapa yang harus dibatasi.

Pengamatan tersebut sejalan dengan temuan Pachico (2021) yang menunjukkan bahwa negara kerap menggunakan justifikasi kemanusiaan dalam kebijakan migrasi, namun pada saat yang sama tetap menjalankan praktik pembatasan ketat, penahanan, dan pelarangan mobilitas. Di balik retorika perlindungan, terdapat logika kontrol yang menempatkan migran dalam posisi subordinat dan rentan. Praktik-praktik tersebut bukan semata-mata upaya menjaga ketertiban, tetapi juga strategi untuk mempertahankan otoritas negara atas siapa yang boleh berada di dalam wilayahnya dan dalam kondisi apa mereka dapat bertahan.

Studi Birnbaum (2023) turut memperlihatkan bahwa negara tidak hanya bertindak pada level kebijakan, tetapi juga melalui produksi wacana publik. Ketakutan masyarakat dan narasi tentang ancaman kerap dipupuk dan dibentuk sedemikian rupa untuk memperkuat legitimasi pembatasan migrasi. Dengan memposisikan kelompok tertentu sebagai risiko, negara memperoleh dasar moral dan politis untuk memperketat regulasi tanpa harus memakai kekuasaan secara represif. Hal ini menunjukkan bagaimana praktik pemerintahan berjalan melalui pengelolaan persepsi, bukan hanya pengaturan fisik pergerakan.

Dengan demikian, migrasi menjadi ruang penting tempat negara menerapkan *art of government* (Foucault, 1991) terhadap populasi lintas negara. Pengaturan migrasi tidak dapat direduksi hanya sebagai urusan administratif yang bersifat teknis, tetapi merupakan bagian dari strategi pemerintahan yang memadukan pengetahuan, kekuasaan, dan wacana untuk membentuk perilaku dan mengatur kehidupan populasi yang bergerak. Dalam konteks ini, migrasi memperlihatkan bagaimana batas-batas negara tidak hanya mengatur wilayah geografis, tetapi juga mengatur subjek-subjek yang melintas di dalamnya.

3.2. Governmentality dan Pembentukan Pengetahuan tentang Migran Foucault (1980) menekankan bahwa kekuasaan dan pengetahuan tidak dapat dipisahkan: kekuasaan selalu memproduksi pengetahuan tertentu, sementara pengetahuan yang dihasilkan itu kemudian memperkuat dan menormalkan kekuasaan yang mendasarinya. Dalam konteks migrasi, hubungan timbal balik tersebut tampak jelas melalui penggunaan istilah-istilah seperti *irregular migrant*, *asylum seeker*, atau *migrant worker*. Kategori ini bekerja sebagai teknologi representasi yang membentuk cara masyarakat memahami keberadaan migran seolah-olah status tersebut mencerminkan kualitas inherent dari individu migran, padahal ia adalah konstruksi administratif dan politis yang memiliki implikasi jauh melampaui label itu sendiri. Dengan kata lain, istilah-istilah itu tidak hanya menggambarkan kenyataan, tetapi ikut menciptakan realitas sosial tentang siapa migran itu dan bagaimana mereka seharusnya diposisikan dalam struktur negara.

Temuan Rytter dan Gregersen (2023) memperlihatkan bagaimana mekanisme tersebut bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian mereka, praktik poligini ditempatkan sebagai bentuk “ketidakcocokan budaya” pada imigran Muslim. Penandaan semacam ini bukan hanya menegaskan stereotip mengenai perbedaan budaya, tetapi juga memberikan landasan bagi negara untuk melakukan intervensi dengan alasan melindungi nilai-nilai nasional atau integrasi sosial. Kategori “tidak cocok” itu pada akhirnya berfungsi sebagai pembenaran moral sekaligus administratif bagi negara untuk mengatur kehidupan keluarga migran, menunjukkan bagaimana kekuasaan beroperasi melalui penilaian budaya yang tampak objektif namun sarat dengan bias struktural.

Penelitian Lee dan Yamanaka (2020) juga mengungkapkan mekanisme serupa dalam konteks Jepang, di mana pernikahan campuran diperlakukan bukan hanya sebagai relasi interpersonal, tetapi sebagai titik penting dalam pengaturan

kewarganegaraan dan identitas nasional. Melalui regulasi yang mengatur akses terhadap status hukum, negara mempertahankan hierarki rasial dan nasional yang telah lama terbentuk. Dengan demikian, institusi pernikahan yang tampaknya privat justru menjadi arena politik di mana garis batas mengenai “keanggotaan” nasional diperkuat. Pengalaman pasangan dalam pernikahan campuran memperlihatkan bagaimana negara membentuk subjektivitas melalui aturan yang secara formal netral, tetapi secara sosial berfungsi menjaga tatanan identitas dominan.

Bahkan program integrasi anak migran yang terlihat positif sekalipun misalnya yang dibahas oleh Barriga et al. (2023) ternyata tidak sepenuhnya bebas dari dimensi kekuasaan. Upaya mendorong inklusi sosial melalui pendidikan usia dini dapat dipahami sebagai bentuk biopolitik (Foucault, 1978), yakni cara negara mengarahkan kehidupan dan identitas penduduk sejak usia muda. Melalui kurikulum, penilaian, dan bahasa integrasi, negara menanamkan nilai-nilai tertentu yang dianggap sesuai dengan norma nasional. Anak-anak migran dibentuk bukan hanya sebagai individu yang perlu beradaptasi, tetapi sebagai subjek yang harus disejajarkan dengan standar budaya mayoritas. Dengan demikian, integrasi menjadi bagian dari strategi negara untuk menata populasi, bukan sekadar program pendidikan atau bantuan sosial.

Seluruh dinamika tersebut menunjukkan bagaimana negara memproduksi *regime of truth*, yakni seperangkat “kebenaran” yang menentukan bagaimana migran didefinisikan, dinilai, dan diatur. “Kebenaran” ini tidak bersifat netral, tetapi merupakan hasil dari proses diskursif dan institusional yang menentukan batas antara yang normal dan yang menyimpang, yang diterima dan yang ditolak. Melalui produksi kebenaran inilah negara membangun dasar legitimasi untuk mengatur mobilitas manusia, mengintervensi kehidupan sosial migran, dan mempertahankan struktur kekuasaan yang telah ada. Dalam kerangka governmentality, migrasi dengan demikian menjadi cermin yang memperlihatkan cara negara membentuk dunia sosial melalui bahasa, pengetahuan, dan pengaturan yang tampaknya rutin namun sarat makna politik.

3.3. Administrasi dan Diskresi sebagai Alat Kekuasaan

Kekuasaan negara dalam pengelolaan migrasi tidak hanya tampak dalam kebijakan besar yang diputuskan pada tingkat nasional, tetapi juga hadir melalui proses administrasi sehari-hari yang sering kali dianggap rutin dan teknis. Prosedur seperti pengajuan visa, perpanjangan izin tinggal, pemeriksaan dokumen di pintu masuk, hingga keputusan spontan petugas imigrasi di lapangan merupakan bagian dari rangkaian praktik yang menentukan apakah seseorang dapat bergerak, bertahan, atau harus meninggalkan wilayah suatu negara. Foucault (1991) menyebut berbagai mekanisme mikro tersebut sebagai *governmental technologies* yakni perangkat yang bekerja secara halus dan tidak selalu tampak otoritatif, tetapi memiliki konsekuensi langsung terhadap kehidupan individu. Melalui teknologi pemerintahan ini, negara membentuk perilaku, membatasi kemungkinan-kemungkinan tindakan, dan menciptakan struktur pengelolaan populasi yang terasa wajar dalam praktik birokrasi.

Temuan Gomez Cervantes (2022) memperlihatkan secara konkret bagaimana kekuasaan ini bekerja pada level mikro. Dalam beberapa kasus, keputusan petugas lapangan dapat menentukan apakah seorang anak migran memperoleh perlindungan atau justru kehilangan hak-haknya. Situasi tersebut menunjukkan bahwa otoritas tidak hanya terletak pada kebijakan formal, tetapi juga pada interpretasi personal petugas terhadap aturan, situasi, dan identitas migran. Dengan demikian, posisi petugas tidak sekadar administratif, tetapi memegang peran penting dalam menentukan hasil akhir pengalaman migrasi seseorang. Fenomena ini memperlihatkan betapa pengetahuan, intuisi, dan bias yang dimiliki petugas dapat menjadi bagian dari mekanisme pengaturan populasi yang sangat memengaruhi kehidupan individu.

Cunningham (2023) menambahkan dimensi lain dari praktik kekuasaan ini melalui analisisnya mengenai pemerintah daerah. Ia menunjukkan bahwa isu migrasi kerap dijadikan komoditas politik oleh aktor lokal untuk memperoleh dukungan publik. Dengan memainkan wacana ancaman atau perlindungan, pemerintah lokal dapat menguatkan legitimasi politiknya, sekaligus memengaruhi bagaimana kebijakan migrasi diterapkan di wilayah masing-masing. Praktik ini memperlihatkan bahwa kekuasaan tidak hanya bergerak dari pusat ke daerah, tetapi justru sering kali dinegosiasikan dan diolah ulang di tingkat lokal sesuai dengan kepentingan politik yang sedang berlangsung.

Dari sini terlihat bahwa kekuasaan negara dalam bidang migrasi bersifat tersebar. Foucault (1978) menyebut fenomena ini sebagai *capillary power*, yakni kekuasaan yang tidak hanya mengalir dari puncak otoritas, tetapi meresap hingga ke titik-titik paling kecil dalam jaringan sosial. Kekuasaan tidak hanya dijalankan oleh negara pusat, tetapi juga oleh pejabat daerah, petugas administratif, sistem informasi, prosedur teknis, serta aturan harian yang tampaknya sederhana. Semua elemen ini saling terhubung membentuk ekosistem pengelolaan mobilitas yang bekerja secara simultan dan tidak selalu disadari oleh individu yang berada dalam sistem.

Dengan demikian, migrasi menjadi medan di mana berbagai bentuk kekuasaan baik yang formal maupun informal, yang besar maupun yang mikro beroperasi secara bersamaan. Negara memanfaatkan berbagai teknologi pemerintahan untuk mengatur populasi, dan kekuasaan tersebut bergerak melalui jalur-jalur yang tidak selalu terlihat, namun sangat menentukan perjalanan hidup para migran.

3.4. Mengatur Kehidupan Migran melalui Biopolitik

Konsep biopolitik didefinisikan sebagai pengaturan atas hidup, tubuh, tenaga kerja, dan reproduksi (Foucault, 1978). Konsep ini sangat relevan untuk memahami dinamika migrasi kontemporer. Dalam kerangka ini, migrasi tidak hanya diperlakukan sebagai persoalan perpindahan fisik dari satu wilayah ke wilayah lain, tetapi sebagai bagian dari strategi negara untuk mengelola kehidupan itu sendiri. Negara mengatur bukan hanya kapan seseorang boleh melintas atau tinggal, tetapi juga bagaimana ia bekerja, berkeluarga, dan membentuk kehidupan sehari-hari di wilayah negara tempat ia bermukim. Pengaturan ini membuat migrasi menjadi lebih dari sekadar urusan mobilitas; ia menjadi mekanisme pengendalian atas keberlanjutan dan kualitas hidup subjek migran.

Temuan Filhol et al. (2023) memperlihatkan gambaran yang sangat nyata mengenai bagaimana biopolitik bekerja dalam dunia kerja. Pekerja migran di sektor pertanian ditempatkan sebagai tenaga kerja yang sangat dibutuhkan untuk menjaga ritme produksi, tetapi pada saat yang sama tidak diberikan status hukum yang stabil. Ketergantungan mereka pada izin tinggal yang mudah dicabut menciptakan kondisi hidup yang rentan dan penuh ketidakpastian. Di satu sisi, tenaga mereka dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi negara; di sisi lain, keberadaan mereka tetap dijaga dalam batas yang meminimalkan risiko politik maupun sosial. Situasi ini sangat sejalan dengan yang oleh Foucault disebut sebagai *biopolitical management*, yaitu strategi negara mengoptimalkan manfaat dari tubuh-tubuh produktif sambil membatasi kemungkinan mereka menjadi beban atau ancaman.

Lee dan Yamanaka (2020) memberikan dimensi tambahan mengenai bagaimana biopolitik bekerja dalam ranah domestik. Pernikahan campuran di Jepang diposisikan bukan sebagai pilihan privat semata, tetapi terkait erat dengan kebijakan kewarganegaraan dan penentuan identitas nasional. Melalui regulasi yang mengatur status keluarga, negara mengontrol arah reproduksi sosial, menentukan siapa yang dapat meneruskan garis keturunan nasional, dan bagaimana keluarga migran diintegrasikan atau dibatasi dalam masyarakat. Dengan cara ini, negara

menggunakan institusi keluarga sebagai perangkat biopolitik untuk menjaga homogenitas identitas nasional sekaligus mengatur regenerasi penduduk.

Melihat berbagai temuan tersebut, jelas bahwa migrasi bukan hanya persoalan “perjalanan” mengenai siapa yang bergerak, kapan, dan melewati batas yang mana tetapi juga persoalan “kehidupan”. Biopolitik bekerja pada tingkat yang sangat intim untuk menentukan akses terhadap pekerjaan, stabilitas status hukum, hak untuk membentuk keluarga, dan bahkan arah reproduksi populasi. Dengan kata lain, negara tidak hanya memutuskan apakah migran boleh masuk atau tinggal, tetapi turut mengatur cara mereka menjalani hidup di dalam struktur sosial yang ada.

Dalam perspektif ini, pengalaman migran memperlihatkan betapa kuat dan mendalamnya jangkauan kekuasaan negara terhadap tubuh dan kehidupan. Migrasi menjadi titik di mana politik kehidupan dijalankan. Sebuah pertemuan antara kebutuhan negara akan tenaga kerja, kepentingan mempertahankan identitas nasional, dan mekanisme biopolitik yang membentuk kehidupan orang-orang yang bergerak melampaui batas negara.

3.5. Deportasi sebagai Bentuk Kekuasaan Tertinggi Negara

Jika *governmentality* bekerja melalui mekanisme-mekanisme halus yang mengatur perilaku dan kehidupan sehari-hari, maka deportasi dapat dipahami sebagai ekspresi paling tegas dari *sovereign power* yaitu kekuasaan negara atas kehidupan dan kematian sosial (Foucault, 1978; 2003). Dalam konteks migrasi, deportasi memperlihatkan bahwa negara memiliki otoritas untuk menentukan siapa yang dapat berada dalam teritorinya dan siapa yang harus disingkirkan. Tindakan ini bukan sekadar langkah administratif, melainkan pernyataan simbolik bahwa negara memiliki kendali penuh atas batas-batasnya, atas keanggotaan dalam komunitas politik, dan pada akhirnya atas keberadaan individu sebagai subjek hukum.

Lenard (2021) menekankan bahwa deportasi tidak dapat direduksi menjadi prosedur hukum yang netral atau teknis. Deportasi berdampak pada seluruh aspek kehidupan seseorang: memutus hubungan sosial yang telah dibangun bertahun-tahun, menghentikan pekerjaan yang menjadi sumber penghidupan, mencabut akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta menggoyahkan identitas yang telah dibentuk melalui pengalaman hidup di negara tujuan. Dalam banyak kasus, deportasi menciptakan “kematian sosial”, sebuah kondisi di mana individu tidak lagi memiliki tempat yang stabil dalam dunia sosial, baik di negara yang ditinggalkannya maupun di negara tujuan pemulangan. Dengan demikian, deportasi menjadi tindakan yang bukan hanya mengeluarkan seseorang secara fisik dari wilayah negara, tetapi juga menghapus posisi sosialnya dalam jejaring kehidupan yang telah ia bangun.

Dalam perspektif foucauldian, deportasi dapat dibaca sebagai momen ketika bentuk kekuasaan yang biasanya berjalan halus dan tersebar tiba-tiba mengeras menjadi tindakan kedaulatan yang eksplisit. Jika *governmentality* berupaya membentuk perilaku dan mengelola populasi melalui regulasi, statistik, dan diskursus, maka deportasi merupakan tindakan yang menandai batas absolut dari kekuasaan tersebut. Negara menunjukkan bahwa ia bukan hanya mampu mengatur kehidupan, tetapi juga mampu “menghentikan” kehidupan itu dalam konteks sosial dan politik. Di sini, tubuh migran menjadi situs tempat negara menampilkan otoritas tertingginya, memperlihatkan bahwa kedaulatan tetap hadir, bahkan dalam era di mana kekuasaan tampaknya bekerja melalui teknik yang lebih halus.

Dengan demikian, deportasi bukan sekadar bagian akhir dari proses migrasi yang tidak sesuai aturan, melainkan demonstrasi paling nyata dari kedaulatan negara atas tubuh migran. Ia memperlihatkan bagaimana kekuasaan negara dapat bergerak dari regulasi yang halus menuju tindakan yang sangat langsung dan menentukan, dan bagaimana migran berada pada posisi paling rentan dalam relasi kekuasaan tersebut.

4. KESIMPULAN

Migrasi dalam konteks modern bukan lagi sekadar perpindahan lintas batas, tetapi menjadi arena utama di mana negara menjalankan dan melegitimasi kekuasaannya. Melalui perspektif *governmentality* Foucault, migrasi terlihat sebagai proses yang melibatkan produksi pengetahuan, pengaturan identitas, serta pembentukan kategori sosial yang menentukan bagaimana migran dipahami dan diperlakukan. Negara tidak hanya berfungsi sebagai pengatur batas fisik, tetapi sebagai aktor yang menciptakan definisi dan klasifikasi seperti “migran legal”, “ancaman keamanan”, atau “migran yang dapat diintegrasikan”, yang kemudian menjadi dasar legitimasi kebijakan dan tindakan administratif.

Kekuasaan negara dalam mengelola migrasi bekerja melalui beberapa lapisan yang saling terkait. Pada tingkat wacana, migran ditempatkan dalam konstruksi makna tertentu yang memengaruhi persepsi publik dan arah kebijakan. Pada dimensi administratif, mekanisme seperti verifikasi identitas, prosedur visa, serta diskresi aparat bekerja secara halus tetapi menentukan akses migran terhadap hak dasar. Dalam dimensi biopolitik, negara turut mengatur aspek kehidupan migran seperti keluarga, pekerjaan, hingga keturunan. Puncaknya, kekuasaan kedaulatan diwujudkan melalui penahanan, pembatasan mobilitas, dan deportasi, yang menunjukkan otoritas negara dalam menentukan keberadaan fisik seseorang di dalam wilayahnya.

Dengan demikian, migrasi merefleksikan bagaimana kekuasaan modern bekerja melalui kombinasi wacana, birokrasi, regulasi kehidupan, dan tindakan koersif. Migran tidak hanya menjadi pelaku mobilitas, tetapi juga subjek yang diklasifikasikan, dinilai, dan dibatasi berdasarkan kepentingan politik, keamanan, ekonomi, dan budaya. Pendekatan *governmentality* membantu memahami migrasi bukan hanya sebagai fenomena sosial atau demografis, tetapi sebagai strategi politik yang membentuk tatanan sosial, legitimasi negara, dan hierarki kewarganegaraan dalam masyarakat modern.

REFERENSI

- Barriga, S. R., MacNevin, M., & Sumsion, J. (2023). A systematic review of interventions promoting social inclusion of immigrant and ethnic minority preschool children. *Early Childhood Education Journal*, 51, 1009–1024.
- Birnbaum, M. (2023). Cutting in line ahead of us: The role of group relative deprivation in shaping gatekeeping attitudes across different immigrant integration contexts in Europe. *International Journal of Intercultural Relations*, 93, 101763.
- Consterdine, E. (2024). Migration governance and the expansion of regulatory surveillance. *Journal of Migration Policy Studies*, 19(2), 145–167.
- Cunningham, S. (2023). Subnational immigration policymaking in the United States: The role of issue entrepreneurs in California, Texas, and Florida. *Policy Studies Journal*, 51(3), 745–774.
- Filhol, L., Della Rosa, A., Dolci, J., Procentese, F., & Schiavi, A. (2023). Immigrant work and the production of Italian agrifood: The variants of subordinate integration. *Dialettica*, 33(2), 266–287.
- Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings*. Pantheon Books.
- Foucault, M. (1991). Governmentality. In G. Burchell, C. Gordon, & P. Miller (Eds.), *The Foucault effect: Studies in governmentality* (pp. 87–104). University of Chicago Press.

- Foucault, M. (2007). *Security, territory, population: Lectures at the Collège de France, 1977–1978*. Palgrave Macmillan.
- Foucault, M. (2008). *The birth of biopolitics: Lectures at the Collège de France, 1978– 1979*. Palgrave Macmillan.
- Gomez Cervantes, A. (2022). Discretion-as-politics in immigration processes: The case of unaccompanied migrant children in the U.S. *Law & Society Review*, 56(2), 269–289.
- Lee, H. K., & Yamanaka, K. (2020). What does intermarriage say about immigrant integration in Japan? The maintenance of a national and gender hierarchy through marriage norms. *International Migration Review*, 54(2), 1–36.
- Lenard, P. T. (2021). Deportation, harms, and human rights. *Social Theory and Practice*, 47(2), 333–359.
- Lumley-Sapanski, A. (2022). Containment, care, and control: The infrastructural politics of migrant reception centers. *Migration Studies*, 10(3), 512–531.
- Pachico, E. (2021). Managing irregularized migration in Mexico: Rhetoric of a renewed approach. *Journal of Borderlands Studies*, 36(4), 1–18.
- Rytter, M., & Gregersen, A. (2023). Polygyny in Denmark: A study of the instrumentalisation of cultural differences in immigration policies. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 49(7), 1544–1561.
- Salmenkari, T. (2024). Paperless governmentality: Documentation practices and migrant subjectivity in contemporary asylum systems. *Journal of Refugee Studies*, 37(1), 1–19.
- Tazzioli, M. (2021). Governing through mobility opacity: Immigration, ambiguity, and administrative control. *International Political Sociology*, 15(4), 340–356.
- Walsh, K. (2023). Bureaucratic bordering and the emotional politics of asylum processing. *Sociology*, 57(2), 278–296.